

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA
MODAL**



Oleh:

Vicka Hajar Aswati

NPM: 14.1.01.08911

Program Studi: Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA
STIESIA SURABAYA
2018**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA
MODAL**

**Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi: Akuntansi
Konsentrasi: Akuntansi Sektor Publik & Perpajakan**

**Oleh:
Vicka Hajar Aswati
NPM: 14.1.01.08911**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA
STIESIA SURABAYA
2018**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN BELANJA MODAL**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

VICKA HAJAR ASWATI
NPM : 14.1.01.08911

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 April 2018

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Iksan Budi Raharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.
Anggota : 1. Dr. Titik Mildawati, M.Si., Ak., CA.
2. Astri Fitria, S.E., M.Si., Ak., CA.

Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima
Oleh :

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Suwardi Bambang Hermanto, M.M., Ak., CA.

Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Ketua STIESIA



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **VICKA HAJAR ASWATI**

N.P.M. : **14.1.01.08911**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 21 April 2018, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya batal saya terima.

Surabaya, 21 April 2018

Yang membuat pernyataan,


Vicka Hajar Aswati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. MAHASISWA

Nama : Vicka Hajar Aswati
NPM : 14.1.01.08911
Program Studi : Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 5 Januari 1995
Agama : Islam
Jumlah Saudara/Anak ke : 3(tiga)/2(dua)
Alamat Rumah : Ds. Sawahan, Kec. Mojosari, Mojokerto
Status : Belum Menikah

II. ORANG TUA

Nama : Mulyono
Alamat Rumah/Telepon : Ds. Sawahan, Kec. Mojosari, Mojokerto
/085604842854
Pekerjaan : Wiraswasta

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1 Tamat SD Negeri Sawahan Tahun 2008
- 2 Tamat SLTP di SMP Negeri 1 Pungging Tahun 2011
- 3 Tamat SLTA di SMK Negeri 1 Pungging Tahun 2014
- 4 Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Tempat	Semester	Tahun	Keterangan
STIESIA	Surabaya	I-VII	2014-2018	-

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Bekerja di	Pangkat/Golongan	Jabatan
-	-	-	-

Dibuat dengan sebenarnya

Vicka Hajar Aswati

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr. wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu dilimpahkan kepada saya, serta berkat doa restu kedua orang tua saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. terselesainya skripsi ini tidak luput dari bimbingan, dukungan dan bantuan orang-orang yang saying pada saya, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dengan tulus kepada:

- 1 Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi ini.
- 2 Ibu Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- 3 Ibu Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- 4 Bapak Dr. Suwardi Bambang Hermanto, M.M., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan kesabaran

dalam membimbing, serta memberikan arahan, nasihat, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5 Ibu Lydia Setyawardani, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Wali SA-4 yang selalu memberikan arahan, dukungan dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.

6 Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

7 Seluruh kepala dan staf di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data-data dalam penyusunan skripsi.

8 Kepada kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

9 Kepada saudara-saudara Khayu Mulyasari, Heny Chamdiyah, Miftakhul Falaq dan Akhyar Qolbi Hafifi atas dukungan, doa serta kasih sayang kalian sehingga penulis bisa menjalankan studi dengan lancar.

10 Teman-teman Chabe Fidya, Maya, Fiky dan Alfi terima kasih atas kebersamaan, canda dan tawa kita selama ini. Kalian yang selalu ada untuk penulis dan tanpa hentinya memberikan semangat, dukungan serta membantu penulis selama masa perkuliahan. Semoga kita diberikan kesuksesan untuk kedepannya.

11 Semua teman-teman SA-4 yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per satu, terimakasih atas kebersamaan kalian selama 4 tahun ini. Kalian telah menjadi teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Penulis menyadari penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum. wr. wb

Surabaya, 10 Maret 2018

VickaHajarAswati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Masalah.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	13
BAB 2: TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	14
2.1 Tinjauan Teoritis	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 Teori Ekonomi Klasik	18
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	20
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.1.5 Dana Alokasi Umum.....	23
2.1.6 Belanja Modal	25
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	26
2.2 Rerangka Pemikiran	28
2.3 Perumusan Hipotesis.....	30
2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal....	30
2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal ..	31
2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.....	33
BAB 3: METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian.....	35
3.2 Teknik Pengambilan Sampel	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel	37
3.4.1 Variabel Penelitian	37

3.4.2	Definisi Operasional Variabel	38
3.5	Teknik Analisis Data	40
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	41
3.5.2	Metode Analisis Data	43
BAB 4:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.1.3	Uji Asumsi Klasik	54
4.1.4	Metode Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
4.1.5	Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i>	60
4.1.6	Hasil Pengujian Hipotesis.....	62
4.2	Pembahasan.....	63
4.2.1	Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal ...	63
4.2.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal .	64
4.2.3	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.....	65
BAB 5:	PENUTUP	68
5.1	Simpulan	68
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	69
5.3	Saran	70
	JADWAL PENELITIAN	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Sampel Penelitian	46
2. Daftar Nama Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai sampel.....	49
3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	50
4. Hasil Uji Autokorelasi.....	57
5. Hasil Uji Multikolinearitas	58
6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	59
7. Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
8. Hasil Uji Statistik F.....	61
9. Hasil Pengujian Hipotesis	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rerangka Pemikiran	29
2. Model Penelitian	29
3. Hasil Uji Normalitas Data Grafik P-P <i>Plot</i>	55
4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik <i>Scatter Plot</i>	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Sampel Penelitian.....	77
2. Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	78
3. Data Pertumbuhan Ekonomi	80
4. Data Pendapatan Asli Daerah.....	82
5. Data Dana Alokasi Umum	84
6. Data Belanja Modal.....	86
7. Hasil Output SPSS	88



INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016.

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 152 laporan keuangan dari 38 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode observasi tahun 2013-2016 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,837 atau 83,7% yang berarti dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, sisanya 16,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Economic Growth, Local Original Income, and General Allocation Funds to Capital Expenditures in Regency / City Government in East Java Province 2013-2016.

The method that been used in this research is purposive sampling with the number of samples of 152 financial reports from 38 districts / cities throughout East Java Province. The data that been used in the form of secondary data which taken from Report Realization of Regional Revenue and Expenditure Budged (APBD) of Regency / City in East Java Province with observation period in year of 2013-2016 that obtained from state Audit Board (BPK) of East Java Province.

The results of the research with multiple linier regression analyze indicates that Economic Growth, Local Original Income and General Allocation Fund have a positive influence on the allocation of Capital Expenditure. With the value of Adjusted R Square of 0.837 or 83.7% which means that can be explained by the variable of economic growth, local revenues and general allocation funds, the remaining 16.21% is explained by other variables outside this research.

Keywords : Economic growth, local own revenue, general allocation fund and capital expenditure

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim dan Abdullah, 2006).

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Tujuan dari Otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan

semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar et al, 2008).

Namun faktanya pemerintah daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja modal. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan daerah. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan suatu pemerintah daerah. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Pada sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu daerah, dimana semakin tinggi nilainya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecendrungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Belanja daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 dibagi dalam dua klasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk membiayai program kegiatan dalam tahun anggaran tertentu (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam hal ini APBD tidak hanya akan berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaan, namun sekaligus merupakan alat politik dan kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah, contohnya seperti menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD (Dirjen Perimbangan Keuangan RI, 2013).

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan prioritas & plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan

umum APBD dan prioritas & plafon anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu memberikan kebijakan alokasi anggaran daerah lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah cara untuk mencapai tujuan otonomi. Informasi mengenai APBD secara nasional sangat diperlukan guna menunjang ketepatan pengambilan kebijakan di bidang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah melalui penyusunan APBD yang efektif, akuntabel dan transparan. APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang mempunyai peranan sangat strategis dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Abdullah dan Halim (2004); Deller dan Maher (2005); dan Maimunah (2006) menunjukkan bahwa secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Secara empiris juga ditemukan adanya fenomena *flypaper effect* yakni adanya perbedaan dalam pola belanja atau pengeluaran untuk pendapatan dari usaha sendiri dengan pendapatan yang diberikan oleh pihak lain.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan

nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Jika belanja modal dapat meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan belanja modal baik untuk mengganti aset lama maupun pembelian aset baru sehingga aset pemerintah daerah bertambah nilainya dari tahun ke tahun. Sehingga dapat dikatakan aset tetap pemerintah daerah yang bersumber dari pelaksanaan APBN merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam setiap tahun anggarannya (Halim dan Abdullah, 2006).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Peningkatan aset pemerintah daerah mestinya juga semakin meningkatkan belanja pemeliharaan terhadap aset tersebut dari tahun ke tahun meskipun

mungkin peningkatan keduanya tidaklah proporsional, karena pengalokasian belanja modal berhubungan dengan pengalokasian belanja pemeliharaan terhadap aset. Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap, artinya jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun atau jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester (Halim dan Abdullah, 2006).

fenomena yang terjadi adalah realisasi anggaran belanja modal setiap tahunnya pada pemerintah kabupaten/kota sering tidak diikuti dengan penambahan belanja pemeliharaan, meskipun belanja pemeliharaan daerah meningkat bahkan dapat terealisasi 100% tetapi tidak menjamin aset pemerintah daerah tersebut dapat terpelihara dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya gedung-gedung yang tidak terawat sebagaimana mestinya, karena dana yang tersedia hanya diperuntukan bagi pembangunan tanpa adanya dana yang cukup untuk melakukan perawatan dalam tahun berjalan atau adanya penyelewengan belanja pemeliharaan yang tidak digunakan untuk semestinya (Sinaga dan Rimbun, 2012).

Oleh karena itu, untuk menunjang ketersediaannya pengalokasian dana untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan, pemerintah daerah melalui pendapatan daerah dan sumber- sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2009:73).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et al (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program

pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja modal untuk berbagai kepentingan publik.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka

pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Timur, sehingga penelitian ini tertarik mengambil judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja Modal
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan belanja modal

2. Kontribusi teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta bahan referensi mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah pembatas penelitian yang akan menjelaskan fokus masalah penelitian. Bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang pada penulisan. Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk menguji, menganalisis dan membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal.

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teoretis

Tinjauan teoretis merupakan penegasan landasan teori yang dipilih oleh peneliti dalam penelitiannya. Landasan teori ini menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adapun landasan teori yang dipakai adalah Teori Keagenan, Teori Ekonomi Klasik, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak dimana manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Teori keagenan disebutkan bahwa terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (principal) kepada manajemen perusahaan (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan tersebut kepada agen. Pembuatan keputusan oleh manajer perusahaan (agen) harus bisa diterima sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), teori keagenan menjelaskan tentang hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual

diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Hubungan antara prinsipal dan agen pada instansi Pemerintah Daerah adalah agen melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait dengan anggaran daerah, sedangkan prinsipal berperan dalam melaksanakan pengawasan. Menurut teori ini hubungan antara bawahan dan atasan pada dasarnya sering bersebrangan karena adanya kepentingan masing-masing pihak yang berbeda (Hasanah dan Suartana, 2014).

Pemerintah pusat tentunya akan lebih sulit untuk melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga dilakukan pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maka pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya. Implikasi teori keagenan muncul dari proses penyusunan anggaran dilihat dari dua prespektif yaitu hubungan rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari hubungan prespektif keagenan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006).

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan daerah ini yang bertindak sebagai prinsipal adalah lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan yang bertindak sebagai agen yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam menjalankan hubungan keagenan

antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai lembaga eksekutif bertugas dalam penyusunan anggaran yang terdiri dari pos-pos pendapatan seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Serta pos-pos belanja yang meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Dimana anggaran tersebut harus disajikan secara nominal. Selanjutnya tugas DPRD sebagai lembaga legislatif yang bertindak sebagai prinsipal adalah menyetujui atau menolak anggaran yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dimana DPRD juga bertugas mengawasi anggaran sehingga diharapkan anggaran yang telah dibuat akan mampu terealisasi dengan efektif.

Masalah yang terjadi dalam hubungan prinsipal (legislatif) dan agen (eksekutif) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu mengenai asimetri informasi. Eksekutif mempunyai keunggulan dalam penguasaan informasi dibanding dengan legislatif. Keunggulan penguasaan informasi ini bersumber dari kondisi aktual bahwa eksekutif merupakan pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Berdasarkan keunggulan penguasaan informasi dan pemahaman yang baik mengenai birokrasi dan administrasi maka eksekutif cenderung memiliki perilaku oportunistik dalam menjalankan fungsinya.

Eksekutif cenderung mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar yang aktual terjadi saat ini, namun untuk usulan target anggaran pendapatan cenderung

lebih rendah agar realisasi yang terlaksana lebih mudah untuk dicapai. Realisasi perilaku oportunistik lain yang dilakukan eksekutif adalah mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas, mengusulkan kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar, mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam program kerja.

Namun bukan hanya eksekutif, legislatif yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan kebijakan juga cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan perilaku oportunistik dalam menjalankan fungsinya. Sebagai prinsipal bagi eksekutif dapat merealisasikan kepentingan dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara dua belah pihak yaitu antara legislatif dan eksekutif. Tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang baik secara individual maupun institusional. Legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun terkadang usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan fungsi legislatif.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini menggambarkan bahwa antara prinsipal dan agen perlu membuat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menghasilkan APBD yang sehat dan tanpa unsur terjadinya perilaku oportunistik baik dari pihak prinsipal maupun dari pihak agen yang dikarenakan adanya asimetri informasi. Prinsipal dan agen juga perlu membuat kebijakan mengenai prosentasi sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal yang dialokasikan untuk membiayai belanja daerah.

2.1.2 Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20. Para ekonom klasik tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Adam Smith sendiri bukanlah pencetus awal pemikiran ekonomi, hanya saja karena orang-orang barat terlalu memberi penghargaan atas karya Smith yang berjudul *The Wealth of Nations* pada tahun 1776 yang berisi tentang ide-ide ekonomi yang sekarang dikenal sebagai ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik menurut Adam Smith menyatakan bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah mengakibatkan hasil/output akan bertambah pula, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi bergantung dari tingkat pertumbuhan penduduk itu sendiri. Adam Smith dikenal sebagai pencetus pertama mengenai *free-market capitalist*, kebijakan *laissez-faire*.

Dalam ajaran Smith menjelaskan agar masyarakat diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang terbaik untuk dilakukan. Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi liberal (bebas). Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (*stationary state*). Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa. Sementara peran pemerintah hanya pada masalah penegakkan hukum, menjaga keamanan serta pembangunan infrastruktur.

Menurut Todaro dan Stephen (2003) dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu : (a) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia, (b) pertumbuhan penduduk yang meningkat jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang, (c) kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu Negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi pada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Hubungan teori ekonomi klasik dengan pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa teori ini menganggap bahwa pertumbuhan penduduk itu bersifat pasif, dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih banyak ditentukan oleh pertumbuhan output dan ini saling berkaitan dimana pertumbuhan output ditentukan oleh jumlah modal yang ditanam, modal ditentukan oleh laba yang diterima, laba bergantung pada pasar (permintaan), permintaan ditentukan oleh jumlah penduduk, dan jumlah penduduk bergantung pada upah dan akhirnya upah ditentukan oleh output yang dihasilkan.

Menurut aliran klasik kemajuan teknologi disebabkan adanya akumulasi kapital (modal), sehingga memungkinkan adanya pembagian kerja melalui mekanisme yang lebih baik, hal ini menyebabkan hasil produktivitas akan menambah peningkatan keuntungan, sehingga mendorong perkembangan investasi. Keadaan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana tingkat upah

dan kesejahteraan penduduk juga ikut naik. Dugaan yang diterima sebagai dasar teori ekonomi klasik menyatakan bahwa faktor alam itu bersifat konstan, sehingga pendayagunaan sumber daya alam, modal dan tenaga kerja akan mencapai tingkat optimum.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono,1985). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau nasional. Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

Menurut prasetyo (2009) pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian pertumbuhan ekonomi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada perubahannya. Pertumbuhan perekonomian berhubungan dengan kenaikan dari output per kapita

sehingga ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk. Output per kapita merupakan total output dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, suatu proses dalam kenaikan output per kapita harus melihat apa yang terjadi pada total output di satu sisi dan jumlah penduduk pada sisi lain. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto,2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Menurut Undang – undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya otonomi, kemandirian daerah dapat dapat diwujudkan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas.

2.1.5 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dijelaskan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2004 sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal, hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum.

Yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD (Widjaja, 2002). DAU merupakan dana yang bersifat “*Block Grant*” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU merupakan dana perimbangan pemerintah pusat yang memiliki persentase paling besar diantara jumlah dana perimbangan lainnya yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam APBN. DAU diberikan Pemerintah untuk mengatasi masalah *horizontal imbalance*, yaitu untuk menjamin keseimbangan sumber-sumber alokasi antar unit-unit pemerintah pada tingkat pemerintah yang sama (Solihin, 2011) . Di beberapa daerah sebagian besar DAU dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai dan sisanya digunakan untuk belanja lainnya seperti belanja modal. Pada dasarnya tidak terdapat batasan dalam penggunaan DAU, sehingga daerah dapat leluasa dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai kebutuhan. Yang menjadi permasalahan apabila DAU tidak dikelola dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan DAU yang dominan terhadap belanja pegawai berdampak pada berkurangnya alokasi DAU pada Belanja Modal, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penyediaan layanan masyarakat seperti program penanggulangan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Pemanfaatan DAU harus dialokasikan pada kegiatan yang sangat penting tapi juga tidak mengesampingkan pengalokasian terhadap belanja pegawai sebagai suatu keharusan daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya pegawainya.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut PP No.24 Tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi mamfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja

modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Menurut Permendagri No.13/2006, belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya

Belanja modal merupakan unsur dari pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset tetap. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah telah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dana meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Abdullah dan Halim (2003) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua berpengaruh signifikan, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

Maimunah (2006) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan *flypaper effect* pada dana alokasi umum ini tidak terjadi. Besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah. Telaah terjadi *flypaper effect* pada belanjadaerah Kabupaten/Kota di Sumatera.

Darwanto dan Yustikari (2007) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linier berganda

(*ordinary least square*) dan menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.

Yovita (2011) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

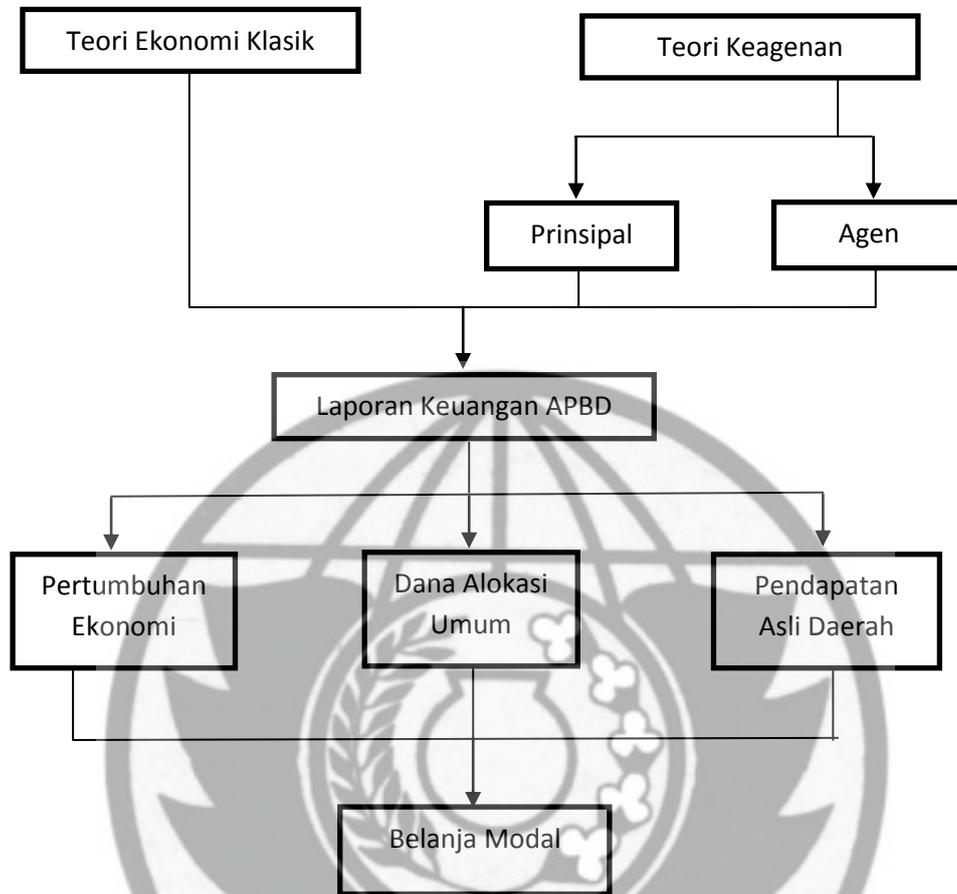
Sinaga (2013) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal, tetapi PDRB tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Jaya dan Dwirandra (2014) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini menggunakan laporan realisasi APBD dan tabel PDRB. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas arah berlawanan.

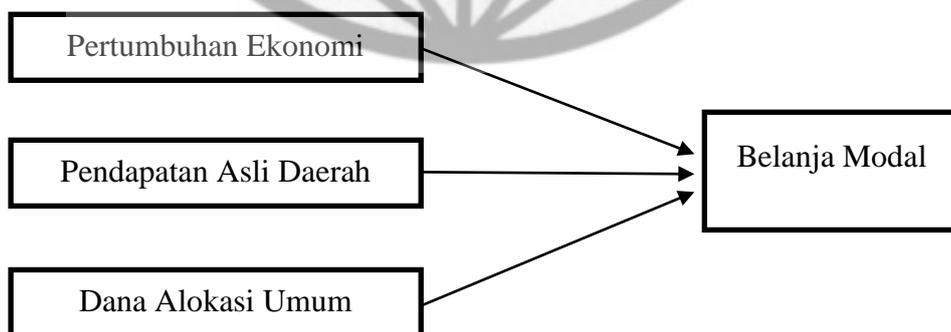
Adyatma (2015) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal.

2.2 Rerangka Konseptual

Belanja modal merupakan jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh aset tetap yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Belanja modal ditentukan oleh besarnya penerimaan pemerintah baik yang berasal dari PAD maupun yang bersumber dari Dana Alokasi Umum. Secara Sederhana kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan secara rinci pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 1
Rerangka Penelitian



Gambar 2
Model Penelitian

2.3 Pengembangan Hipotesis

Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut daerah untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, pemerintah daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap yang dikategorikan sebagai belanja modal. Untuk itu, daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki.

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Melalui belanja modal disediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro (2009).

H_1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam konteks PAD dapat dilihat terjadinya teori keagenan, Pemerintah sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi daerah, dan lain-lain untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Belanja modal yang bersumber dari PAD juga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*.

Darwanto dan Yustikari (2007) mengidentifikasi bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan

Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar- besarnya. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan – temuan empiris di atas , hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H_2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah dalam melaksanakan Otonomi daerah harus memiliki sumber – sumber pembiayaan sehingga tujuan desentralisasi dapat terlaksanakan, dan tidak menyimpang dari Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan *asymmetric*. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data sekunder dari data Laporan APBD. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2008:402) atau data yang dimiliki oleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak perantara. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Peneliti memperoleh data mengenai laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah se-Jawa Timur dengan periode anggaran tahun 2013-2016.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2008:13).

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2008:73) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah se-Jawa Timur periode anggaran 2013-2016.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana dalam pengambilan sampel kemungkinan peneliti memiliki tujuan, target serta pertimbangan tertentu dalam menentukannya.

Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur yang telah memasukkan laporan realisasi APBD (PAD, DAU, dan Belanja Modal) periode anggaran tahun 2013-2016 ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Jawa Timur.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu jenis data penelitian berupa arsip yang memuat tentang laporan realisasi APBD.

3.3.2 Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari laporan realisasi APBD tahun 2013-2016 yang diperoleh dari instansi pemerintahan (BPK).

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tindakan atau usaha memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dan penelitiannya. Untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur selama periode penelitian 2013 – 2016 yang diperoleh dari instansi pemerintahan (BPK).

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Didalam penelitian ini terdapat dua variabel, variabel dependen dan independen yaitu:

3.4.1 Variabel

1. Variabel dependen adalah variabel yang tergantung pada variabel lain (Sugiyono, 2013:61). Variabel dependen merupakan variabel terikat yang mengikuti perubahan-perubahan dari variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal.
2. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013: 61). Variabel independen dalam penelitian ini

adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lain dengan cara memberikan arti atau operasional dari variabel yang diperlukan untuk mengukur variabel yang diteliti.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{(\text{PDRB}_{t-1})} \times 100\%$$

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang sah (LPS), yang dirimuskan dengan:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan APBD. Rasio Dana Alokasi Umum diperoleh dari Dana Alokasi Umum dibagi dengan total pendapatan daerah dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana :

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

4. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja langsung yang digunakan untuk alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari dua belas bulan serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ &\text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja jalan,} \\ &\text{Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk mengukur hubungan antara tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu datanya diuji dalam uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menurut Ghozali (2006) dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Data yang diperoleh dalam penelitian akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar sebelum melakukan pengujian hipotesis. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada model regresi linier berganda, oleh karena itu perlu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi model klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel tidak bebas dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dilakukan dengan melihat norma *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi klasik yang kedua adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varian variabel dalam model tidak sama (konstan). Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. artinya, setiap observasinya mempunyai rentabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t .

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan hubungan yang sempurna antara variabel-variabel independen. Jika didalam pengujian ternyata didapatkan sebuah kesimpulan bahwa antara variabel independen tersebut saling terkait, maka pengujian tidak dilakukan kedalam

tahapan selanjutnya yang disebabkan oleh tidak dapat ditentukannya koefisien regresi variabel tersebut tidak dapat juga ditentukan nilai *standart error*-nya menjadi tak terhingga. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam uji multikolinieritas, salah satunya adalah nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Dasar dalam pengambilan keputusan dari kedua metode tersebut adalah :

Untuk *tolerance* :

- a. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.
- b. Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 maka artinya telah terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

Untuk nilai VIF (Varian Inflation Factor)

- a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.
- b. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

3.5.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang ada dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji asumsi klasik.

1. Uji Regresi Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*). Hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = *Error*

Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter regresi untuk membantu menjawab hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistik yang digunakan dalam penelitian didukung dengan program SPSS.

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_0 diterima.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis dan panel (*pooled data*) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBN. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi :

2. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan hitung dengan tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

2 Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan

membandingkan F hitung dengan F tabel pada level of *significant* 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Ho : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan H₁ ditolak

b. Jika F hitung > F tabel maka H₁ diterima dan Ho ditolak

3. Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel -variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bagian ini akan mengemukakan hasil penelitian mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2013-2016. Hasil penelitian yang akan dijelaskan antara lain gambaran objek penelitian, pemilihan sampel, statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda beserta pengujian hipotesis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Timur merupakan provinsi dibagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan UU No. 2 Tahun 1950. Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.799,75 km² dan jumlah penduduk sebanyak 39 juta jiwa lebih pada tahun 2016 yang terdiri berdasarkan jenis kelamin laki-laki ada 19.29 juta jiwa dan perempuan ada 19,78 juta jiwa. Secara nasional, jumlah penduduk Jawa Timur di urutan nomor dua setelah Jawa Barat dengan 47 juta lebih penduduk. dibanding tahun 2015, jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 227 ribu lebih jiwa.

Jawa Timur terletak antara 110,0' BT hingga 114,4' BT dan Garis Lintang 7,12' LS dan 8,48' LS. Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi

di pulau jawa. Secara umum Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah kepulauan madura yang luasnya hanya sekitar 10% saja. Jawa Timur memiliki 229 pulau yang terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.834 km. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di utara, Selat Bali/Provinsi Bali di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Provinsi Jawa Tengah dibagian barat (Febriana, 2015)

Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Jawa Timur yang merupakan salah satu Provinsi di Negara Indonesia mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Unit pemerintah yang dikoordinir oleh provinsi secara langsung adalah kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan, sedangkan suatu kecamatan terbagi habis menjadi beberapa desa dan Provinsi Jawa Timur terbagi habis menjadi 662 kecamatan dan 8.506 desa/kelurahan.

4.1.2 Pemilihan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan pada laporan keuangan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang diambil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan tahun penelitian selama empat tahun yaitu 2013-2016. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	2013	2014	2015	2016	Jumlah Sampel
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	38	38	38	38	152
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Jumlah Sampel Akhir	38	38	38	38	152

Sumber : Data yang diolah

Dalam tabel 1 tersebut, peneliti menggunakan sampel sebanyak 152 laporan keuangan pada periode tahun 2013 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* dalam proses seleksi pemilihan sampel, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 152 unit sampel. Dalam tabel 1 tersebut seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur telah mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Data-data tersebut diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini merupakan daftar nama pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah :

Tabel 2
Daftar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bangkalan	20	Kabupaten Pasuruan
2	Kabupaten Banyuwangi	21	Kabupaten Ponorogo
3	Kabupaten Blitar	22	Kabupaten Probolinggo
4	Kabupaten Bojonegoro	23	Kabupaten Sampang
5	Kabupaten Bondowoso	24	Kabupaten Sidoarjo
6	Kabupaten Gresik	25	Kabupaten Situbondo
7	Kabupaten Jember	26	Kabupaten Sumenep
8	Kabupaten Jombang	27	Kabupaten Trenggalek
9	Kabupaten Kediri	28	Kabupaten Tuban
10	Kabupaten Lamongan	29	Kabupaten Tulungagung
11	Kabupaten Lumajang	30	Kota Batu
12	Kabupaten Madiun	31	Kota Blitar
13	Kabupaten Magetan	32	Kota Kediri
14	Kabupaten Malang	33	Kota Madiun
15	Kabupaten Mojokerto	34	Kota Malang
16	Kabupaten Nganjuk	35	Kota Mojokerto
17	Kabupaten Ngawi	36	Kota Pasuruan
18	Kabupaten Pacitan	37	Kota Probolinggo
19	Kabupaten Pamekasan	38	Kota Surabaya

Sumber : LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiono (2009:173) analisis deskriptif atau statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa adanya maksud memuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan distribusi data diantaranya rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari sampel yang telah diteliti. Standar deviasi digunakan untuk

mengetahui seberapa besar data yang diteliti tersebut bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah yang paling besar dari data yang telah diteliti (Febriana, 2015). Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran masing-masing variabel penelitian antara lain Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen dan Belanja Modal (BM) sebagai variabel dependen.

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder mengenai Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2013-2016, maka hasil SPSS tentang statistik deskriptif disajikan pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	152	71.856	2.131.478	383.228	307.366
PE	152	-0.15	0.86	0.3381	0.17273
PAD	152	39.249	4.091.867	296.543	532.643
DAU	152	353.128	1.709.892	893.151	287.312
Valid N (listwise)	152				

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data ini menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atas variabel-variabel yang telah digunakan. Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 152 data observasi yang digunakan, dengan rincian variabel dependen dan independen sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tabel 3 terlihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar Rp -0.15. Kabupaten/Kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai minimum adalah Kota Batu pada tahun 2013. Yang berarti bahwa rendahnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu disebabkan karena perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Batu yang lambat serta adanya inflasi disebabkan kenaikan harga beberapa komoditas bahan makanan utama karena penurunan stok/bahan akibat kondisi cuaca yang kurang baik.

Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai maksimum sebesar Rp 0.86. Dari data diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada Kabupaten/Kota adalah Kota Surabaya pada tahun 2016. Naikannya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, dikarenakan adanya kenaikan PAD, dimana Kota Surabaya memiliki tiga sektor penunjang perekonomian yakni perdagangan, hotel dan restoran, serta angkutan umum/transportasi. Ketiga sektor ini sangat dominan dan berperan besar menyanggah pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Kenaikan penanaman modal usaha yang ditompang penyediaan sarana infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

Adapun nilai rata-rata (*mean*) dari Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama empat tahun adalah sebesar Rp 0.3381. Sedangkan nilai standar deviasi dari Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar Rp 0.17273.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel 3 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 39.249 Juta. Pendapatan Asli Daerah terendah adalah Kota Batu pada tahun 2013. Oleh karena itu Kota Batu masih sangat tergantung dengan Pemerintah pusat untuk membiayai belanja modalnya, Sehingga Kota Batu harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali terus menerus sumber Pendapatan Asli Daerahnya sedikit lebih intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 4.091.867 juta. Dari data diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2016. Tingginya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kemandirian otonomi daerah yang lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya.

Selain itu rata-rata (*mean*) dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama empat tahun sebesar Rp 296.543 juta. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 532.643 juta. Nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 532.643 juta yang lebih besar dari *mean* Rp 296.543 juta menunjukkan bahwa distribusi data cenderung ada perubahan peningkatan/ tidak normal.

Berdasarkan data yang diperoleh pada empat periode yang digunakan sebagai sampel diketahui bahwa terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan ada progress yang cukup baik dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah.

3. Dana Alokasi Umum

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 353.128 juta. Dari data diketahui bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Alokasi Umum terendah adalah Kota Pasuruan pada tahun 2013. Rendahnya Dana Alokasi Umum Kota Pasuruan menunjukkan bahwa dengan wilayah yang tidak begitu luas bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya.

Sedangkan nilai maksimum Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.709.892 juta. Dari data diketahui bahwa kabupaten/kota yang memiliki Dana Alokasi Umum tertinggi adalah kabupaten Jember pada tahun 2016. Tingginya Dana Alokasi Umum kabupaten jember tersebut menunjukkan bahwa kabupaten jember masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat.

Dengan data yang dilakukan selama empat tahun, Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 893.151 juta dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 287.312 juta. Kecilnya nilai standar deviasi sebesar Rp 287.312 juta dibanding dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 893.151 juta menunjukkan bahwa distribusi cenderung normal.

4. Belanja Modal

Pada tabel 3 terlihat bahwa Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar Rp 71.856 juta. Dari data diketahui bahwa nilai Belanja Modal terendah adalah Kota Pasuruan pada tahun 2013. Rendahnya Belanja Modal menunjukkan

bahwa Kota Pasuruan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang dimiliki dapat membiayai Belanja Modal daerahnya dengan dana sebesar Rp 71.856.

Sedangkan nilai Belanja Modal maksimum sebesar Rp 2.131.478 juta. Dari data diketahui bahwa nilai Belanja Modal tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya dalam mengalokasikan sebagian besar biayanya untuk Belanja Modal dalam kegiatan pembangunan daerahnya.

Dengan data yang diteliti selama empat tahun nilai Belanja Modal memiliki rata-rata (*mean*) sebesar Rp 383.228 juta dan nilai standar deviasi Belanja Modal sebesar Rp 307.366 juta. Nilai standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

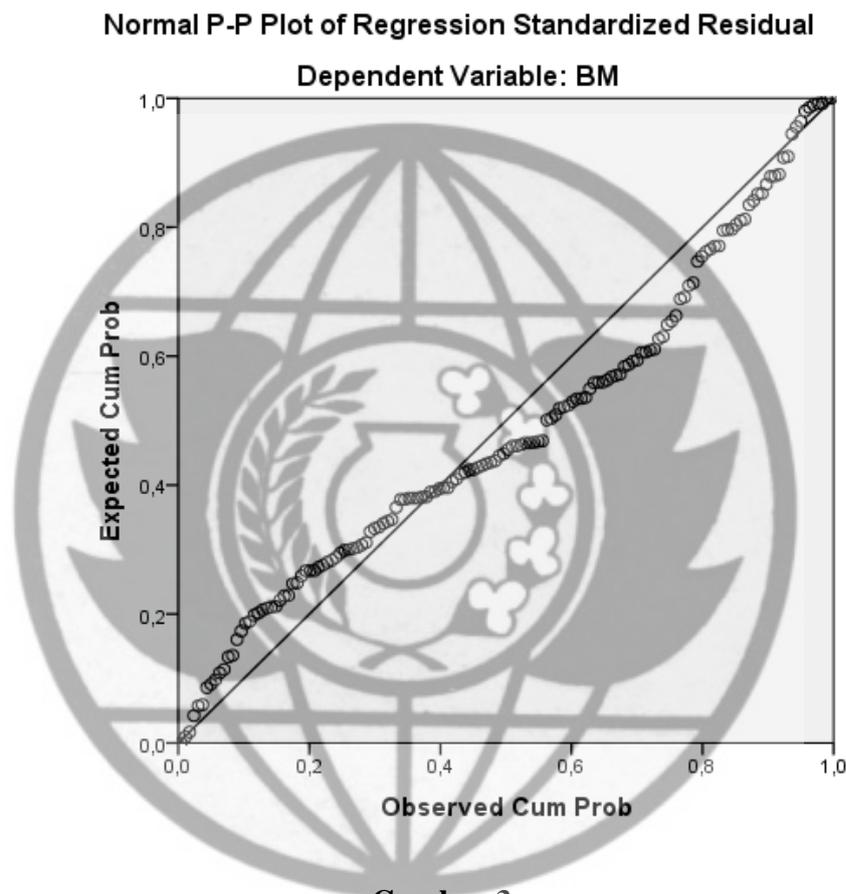
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi. Dalam penelitian ini, pengujian yang dilakukan terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Data ini diolah dengan menggunakan SPSS 22 dari data yang telah diolah, hasil uji asumsi klasik dapat dirinci sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut variabel-variabel penelitian yang telah memiliki distribusi normal. Untuk

menguji normalitas data dapat menggunakan analisis grafik dengan melihat normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Jika data normal maka data akan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil uji normalitas data *P-Plot* dapat disajikan sebagai berikut :



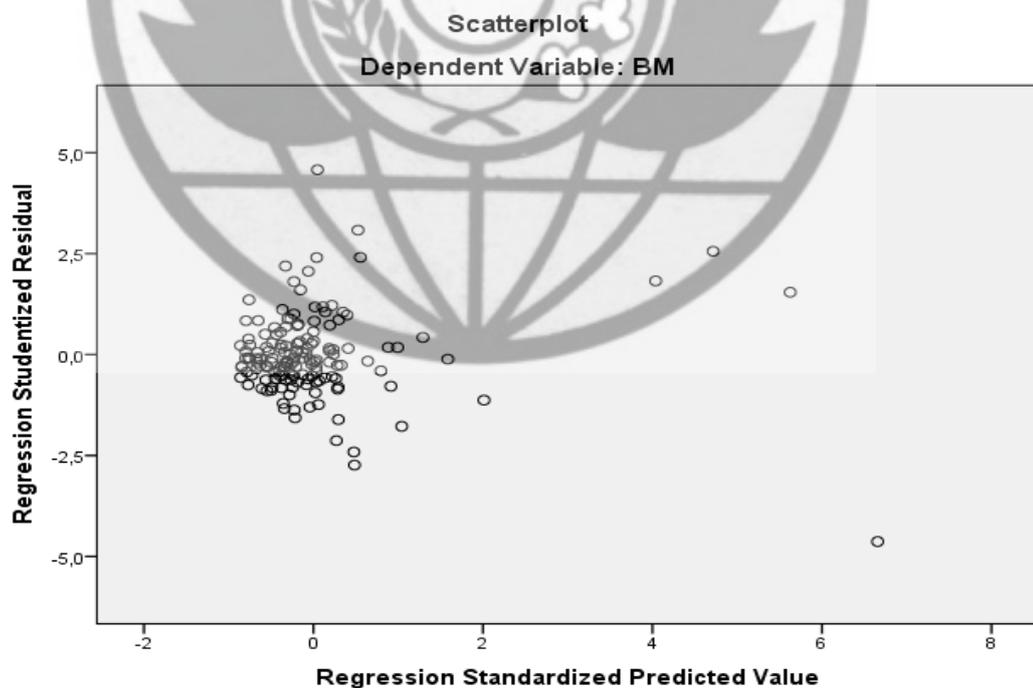
Gambar 3
Hasil Uji Normalitas Data Grafik P-Plot

Sumber :Hasil Output SPSS

Dalam gambar 3 dapat dilihat bahwa grafik normal *P-P Plot* diatas, titik-titik yang menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jadi dalam grafik diatas menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas data.

2. Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedasitas. Ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Hasil uji heteroskedasitas dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber : Hasil Output SPSS

Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedasitas Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasi adanya heteroskedasitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson*. Untuk mengetahui ada tiaknya autokorelasi dapat dilihat berdasarkan nilai *Durbin-Watson*. Jika nilai yang diperoleh pada *Durbin-Watson* diantara -2 sampai dengan +2, maka model regresi dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi. Hasil autokorelasi tersebut dapat disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,685

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Pada tabel diatas nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar (terletak antara -2 sampai dengan +2), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi adanya autokorelasi.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PE	,968	1,033
PAD	,863	1,159
DAU	,890	1,124

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* dari variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai sebesar 0,113, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,110, dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai sebesar 0,880. Ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai *tolerance* > 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Begitu juga dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada tabel diatas. Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai 8,832, variabel Pendapatan Asli

Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 9,113, dan variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai sebesar 1,136. Karena ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai $VIF < 0,05$, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas.

4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen atau independen. Berikut adalah merupakan hasil analisis regresi linier berganda dari data yang diolah :

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,031	3,678		,031	,975
PE	1,711	5,693	,064	1,983	,048
PAD	,481	,020	,840	7,104	,000
DAU	,225	,036	,210	6,233	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil Output SPSS

Dari tabel 8 yang menunjukkan hasil dari analisis regresi linier berganda di atas, dapat disusun fungsi atau persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$BM = 1,031 - 1,711 + 0,481 + 0,225 + e$$

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Karena uji koefisien determinasi (R^2) memiliki kelemahan, maka digunakanlah *Adjusted R Square* yang berkisar antara angka 0 dan 1. Apabila nilai *Adjusted R Square* semakin mendekati angka 1, maka semakin baik kemampuan persamaan regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,922 ^a	,850	,847	1,2213

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil Output SPSS

Dari tabel 9 yang disajikan diatas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,847 atau 84 persen. Artinya perubahan yang terjadi pada variabel belanja modal sebesar 84 persen mampu dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya 16 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model atau persamaan regresi yang telah terbentuk layak untuk dijadikan sebagai alat untuk

estimasi dalam penelitian. Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan *analysis of variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang berbentuk layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat diuji lebih lanjut, begitu juga sebaliknya. Hasil uji kelayakan model regresi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of fit)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,201	3	4,733	2,262	,000 ^b
Residual	2,143	148	1,704		
Total	1,344	151			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari hasil pengujian kelayakan model regresi (*Goodness of fit*) yang telah disajikan pada tabel ANOVA diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 253,837 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat lanjut ke pengujian selanjutnya.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

Uji statistik T dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, maka apabila t hitung $> t$ tabel atau Sig. $< 0,05$, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung $<$ tabel atau $\text{Sig.} > 0,05$, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikansi parameter individual disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Parameter Individual (Uji T)

	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	1,031	3,678		,031	,975
PE	1,711	5,693	,064	1,993	,048
PAD	,481	,020	,840	24,537	,000
DAU	,225	,036	,210	6,229	,000

a. Dependent Variable: BM
Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 11 diatas, nilai signifikan (Sig.) dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut :

1. H_1 : Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai t hitung sebesar 1,993 dengan signifikansi 0,050 (tidak lebih dari 0,050) yang berarti Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal atau hipotesis diterima.

2. H_2 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai t hitung sebesar 24,537 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,050) yang berarti Pendapatan

Asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal atau hipotesis diterima.

3. H_3 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai t hitung sebesar 6,229 dengan signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,050) yang berarti Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal atau hipotesis diterima

4.2 Pembahasan

Model regresi penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik secara keseluruhan, yang berarti bahwa model regresi ini bebas dari adanya gejala multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedasitas.

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat belanja modal. Dan sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah maka belanja modal juga akan rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Jika suatu angka pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahun menurun meskipun anggaran belanja modal setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi yang lambat hal ini terjadi karena beberapa indikator ekonomi yaitu inflasi, ekspor barang dan jasa, dan impor luar negeri yang membuat perlambatan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lambat tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, serta dalam penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang melakukan penelitian terhadap sampel kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Bagi pemerintah Pendapatan Asli Daerah sangat penting karena dalam Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah.

Dalam besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan untuk tujuan pembangunan di daerahnya. Jika Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah semakin besar, maka daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan dimasa yang akan datang peran Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam merencanakan Belanja Modal daerah. Sejalan dengan PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika

pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula belanja modal (Febriana, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Darwanto dan Yustikari (2007), Febriana (2015), Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Disisi lain, hasil ini tidak mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013), Tolu el al (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dialokasikan oleh daerah tersebut. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat maka akan mendorong pengeluaran daerah yang besar juga dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah tersebut. Semakin besar kebutuhan daerah maka semakin besar pula Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU memiliki keterkaitan dengan Belanja Modal, karena DAU yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan prasarana. Maka dari itu semakin tinggi DAU yang diterima maka belanja modal juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Darwanto dan Yustikasari (2007), Febriana (2015), Tuasikal (2008), dan Tolu et al (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Disisi lain hasil ini tidak mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013), Sholihah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aliokasi Umum terhadap Belanja Modal pada periode tahun 2013-2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut memungkinkan pertumbuhan ekonomi dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal sehingga dapat meningkatkan belanja modal pada setiap tahunnya.
- 5.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Modal, karena antara PAD dengan Belanja Modal terjadi hubungan yang timbal balik dengan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal

ini akan meningkatkan Belanja Modal. Dalam setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima oleh setiap daerah.

5.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal akan semakin tinggi. Terdapat keterkaitan antara dana transfer pemerintah dengan belanja modal. Dana Alokasi Umum yang tinggi akan meningkatkan perekonomian dan kebutuhan daerah sehingga belanja pemerintah atas Belanja Modal pun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan pengeluaran pemerintah melalui Belanja Modal.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang telah terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga generalisasi hasil penelitian dibatasi hanya pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan pada periode 2013 sampai dengan 2016.

Selain itu, penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja

modal. Variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi belanja modal tidak diikutkan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan dari jumlah sampel hanya menggunakan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga yang bisa dijadikan sampel jumlahnya sangat terbatas dengan rentan waktu yang hanya 4 tahun dan data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran APBD, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut :

5.2.1 Penelitian ini hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode 4 tahun. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan waktu pengamatan, dikarenakan dengan jumlah sampel yang lebih besar dengan periode yang lebih panjang akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh generalisasi dan akan memberikan hasil yang valid atau hasil yang mendekati sebenarnya.

5.2.2 penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin disimpulkan secara umum.

5.2.3 penelitian ini menghasilkan *Adjusted R Square* yang tinggi yaitu 83,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain diluar penelitian ini misalnya dana alokasi khusus, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran dan dana bagi hasil.



JADWAL PENELITIAN

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

No	Kegiatan Penelitian	2017															2018											
		Oktober					November					Desember					Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Revisi format penulisan bab 1																											
2	Revisi tinjauan teoretis																											
3	Revisi uraian dukungan teori																											
4	Revisi teori keagenan																											
5	Revisi Teori yang mendukung																											
6	Revisi Teori yang mendukung																											
7	Revisi teknik analisis																											
8	Revisi pembahasan																											
9	Revisi daftar pustaka																											
10	Revisi saran																											
11	Setuju diujikan																											

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma. 2015. Studi tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.4(2).
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo
- _____. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo
- _____. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo
- _____. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo
- Badan Pusat Statistik. 2013-2016. Jumlah Penduduk. <http://jatim.bps.go.id> 23 Januari 2018. (09.20)
- Boediono. 2015. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro, Edisi Keempat, BPFE-Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM
- Crouch, R. L. 1972. *Macroeconomics.USA; Harcourt Brace Jovanovich Inc.*
- Darwanto dan Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.*
- Deller,S, C. ,dan V. Lledo. 2002. *Winconsin local government, state sharedrevenues and the illusive flypaper effect. University of Winconsin – Madison, Working Paper*
- Dirjen Perimbangan Keuangan RI.2013. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah.
- Febriana,S. I. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(9): 1-22.
- Fozzard. 2001. *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI).Working paper147.*

- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan program SPSS. Edisi 4. Badan Penebitan Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim dan Abdullah. 2006. Studi tentang Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(2) p. 17-32.
- _____. 2004, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Revisi. Jakarta; Salemba Empat.
- Hasanah dan Suartana. 2014. Pengaruh Interaksi Motivasi dan Budaya Organisasi Pada Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Senjangan Anggaran. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol.6 (1), ISSN, Hal. 46-62.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976, *The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*.
- Kawedar dan Warsito. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Semarang UNDIP.
- Latifah, N. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik. *Fokus Ekonomi* 5(2):85-94
- Lin dan Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol.49. Hal : 1-21.
- Lupia, A. dan M. Mc Cubbins. 2000. *Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed*. *European Journal of Political Research* 37;291-307
- Maimun, M. 2006. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 4
- Mardiasmo. 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta
- _____. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. *Jurnal Investasi* 9(2): 91-102.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Putro, N. S. dan P. Sugeng. 2011. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal.
- PP Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahardja, P. dan M. Manurung 2005. Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar-edisi 3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LP-FEUI).
- Republik Indonesia, 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Dan telah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sholihah, I. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa. *Jurnal Analisis Akuntansi* 3(4): 553-562.
- Sinaga dan Rimbun C.D Sidabutar. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.
- Sudiyono. 1983. Ekonomi Makro. Analisa IS-LM dan Permintaan Penawaran agregatif
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2008, Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D). Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung
- Syukriy dan Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI* Surabaya 16-17 Oktober: 140-159.
- Todaro, M, P. and Smith, S. 2003. Economic Development. UK: Pearson Education Limited
- Tolu dan N. Walewangko. 2016. Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2): 540-549.

Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), hal: 142-155.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

_____. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Yovita, (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.



Lampiran 1

1. PENDAPATAN		1. BELANJA	
1.1 Pendapatan Asli Daerah		1.1 Belanja Operasi	
1.1.1 Pendapatan pajak daerah	XX	1.1.1 Belanja Pegawai	XX
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah	XX	1.1.2 Belanja barang	XX
1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	XX	1.1.3 Belanja Hibah	XX
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah	<u>XX</u>	1.1.4 Belanja bantuan sosial	XX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	8X	1.1.5 Belanja bantuan keuangan	<u>XX</u>
1.2 Pendapatan transfer		Jumlah Belanja Operasi	10X
1.2.1 Transfer pemerintah pusat- Dana perimbangan		1.2 Belanja Modal	
1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak	XX	1.2.1 Belanja tanah	XX
1.2.2.1 Dana bagi hasil bukan pajak	XX	1.2.2 Belanja peralatan dan mesin	XX
1.2.3.1 Dana alokasi umum	XX	1.2.3 Belanja gedung dan bangunan	XX
1.2.4.1 Dana alokasi khusus	<u>XX</u>	1.2.4 Belanja jalan, irigasi, dan bangunan	XX
Jumlah transfer pemerintah pusat	8X	1.2.5 Belanja aset tetap lainnya	<u>XX</u>
1.2.2 Transfer pemerintah pusat lainnya		Jumlah Belanja Modal	10X
1.2.2.1 Dana otonomi khusus	XX	1.3 Belanja Tak Terduga	
1.2.2.2 Dana penyesuaian	<u>XX</u>	1.3.1 Belanja tak terduga	<u>XX</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat lainnya	4X	Jumlah belanja tak terduga	2X
1.2.3 Transfer pemerintah provinsi		1.4 Transfer	
1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak	XX	1.4.1 Bagi hasil pajak	XX
1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil pajak lainnya	XX	1.4.2 Bagi hasil Retribusi	XX
1.2.3.3 Bantuan keuangan provinsi lainnya	<u>XX</u>	1.4.3 Bagi hasil pendapatan lainnya	<u>XX</u>
Jumlah transfer pemerintah provinsi	6X	Jumlah transfer	6X

Lampiran 2

Jumlah Pendapatan Transfer (Tot. 1.2.1 s/d 1.2.3)	18X	Jumlah Belanja (1.1 s.d 1.4)	
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah			28X
1.3.1 Pendapatan hibah	XX		
1.3.2 Pendapatan dana darurat	XX		
1.3.3 Pendapatan lainnya	XX		
1.3.4 Lain-lain pendapatan daerah yang sah	XX		
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	XX		
Jumlah Pendapatan (1.1 s.d 1.3)	22X		
Surplus/Defisit (jml pend-jml belanja)	XX	Surplus/Defisit (jml pend – jml belanja)	XX
2. Pembiayaan		2. Pembiayaan	
2.1 Penerimaan daerah		2.1 Pengeluaran daerah	
2.1.1 Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	XX	2.1.1 Pembentukan dana cadangan	XX
2.1.2 Pencairan dana cadangan	XX	2.1.2 Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah	XX
2.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	XX	2.1.3 Pembayaran utang pokok	XX
2.1.4 Penerimaan Pinjaman daerah	XX	2.1.4 Penerimaan pinjaman daerah	XX
2.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	XX	Jumlah Pengeluaran Daerah	8X
2.1.6 Penerimaan piutang daerah	XX	Pembiayaan Netto	XX
Jumlah Penerimaan daerah	12X	(jml penerimaan daerah – jml pengeluaran daerah)	XX
Pembiayaan Netto	XX		
(jml penerimaan daerah – jml pengeluaran daerah)			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SPA/SILPA)	XX	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SPA-SILPA)	XX
(jml penerimaan daerah + jml pembiayaan netto)		(jml penerimaan daerah + jml pembiayaan netto)	

Lampiran 3

Data Pertumbuhan Ekonomi (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	83.248	101.110	122.078	200.078
2	Kabupaten Banyuwangi	161.975	208.903	249.037	367.871
3	Kabupaten Blitar	96.052	135.077	176.938	224.107
4	Kabupaten Bojonegoro	195.972	195.054	262.951	340.406
5	Kabupaten Bondowoso	67.783	84.851	122.173	177.024
6	Kabupaten Gresik	423.216	636.488	842.196	715.479
7	Kabupaten Jember	290.134	460.926	508.050	524.137
8	Kabupaten Jombang	143.931	205.760	256.125	347.141
9	Kabupaten Kediri	126.026	190.157	272.922	339.113
10	Kabupaten Lamongan	124.605	178.889	226.766	403.473
11	Kabupaten Lumajang	107.281	117.289	170.242	242.111
12	Kabupaten Madiun	107.281	100.462	128.675	163.635
13	Kabupaten Magetan	74.449	112.758	122.839	165.616
14	Kabupaten Malang	192.760	255.197	333.188	502.754
15	Kabupaten Mojokerto	190.235	302.840	400.008	447.620
16	Kabupaten Nganjuk	118.056	201.044	237.473	323.045
17	Kabupaten Ngawi	74.197	100.689	138.773	195.606
18	Kabupaten Pacitan	57.120	67.333	89.469	150.466
19	Kabupaten Pamekasan	67.760	83.820	125.125	178.478
20	Kabupaten Pasuruan	67.760	296.720	372.453	480.757
21	Kabupaten Ponorogo	97.508	128.120	177.247	240.111
22	Kabupaten Probolinggo	86.529	127.941	163.831	221.178
23	Kabupaten Sampang	61.040	77.696	121.297	135.874
24	Kabupaten Sidoarjo	721.794	919.705	1.090.575	1.335.283
25	Kabupaten Situbondo	67.497	101.694	125.963	173.835
26	Kabupaten Sumenep	91.136	115.497	166.653	208.982
27	Kabupaten Trenggalek	80.964	109.184	124.093	182.173
28	Kabupaten Tuban	185.414	206.169	260.938	364.133
29	Kabupaten Tulungagung	121.702	182.444	213.009	342.570
30	Kota Blitar	56.369	75.243	82.435	131.920
31	Kota Kediri	126.946	137.460	128.675	2.383.017
32	Kota Madiun	55.683	85.739	111.378	173.325
33	Kota Malang	262.740	366.245	353.427	477.541

34	Kota Mojokerto	60.805	73.240	92.841	152.462
35	Kota Pasuruan	51.342	69.229	92.730	147.818
36	Kota Probolinggo	73.520	80.747	108.620	171.307
37	Kota Batu	2.570.793	2.953.980	3.520.136	4.091.866
38	Kota Surabaya	39.248	59.855	80.149	109.533



Lampiran 4

Data Pendapatan Asli Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	83,249	101,111	122,079	200,074
2	Kabupaten Banyuwangi	161,976	208,904	249,037	367,872
3	Kabupaten Blitar	96,053	135,078	176,939	224,107
4	Kabupaten Bojonegoro	195,973	196,055	262,952	340,407
5	Kabupaten Bondowoso	67,784	84,852	122,174	177,025
6	Kabupaten Gresik	423,217	636,489	842,197	715,480
7	Kabupaten Jember	290,135	460,927	508,051	524,138
8	Kabupaten Jombang	143,932	205,761	256,126	374,142
9	Kabupaten Kediri	126,027	190,158	272,923	339,114
10	Kabupaten Lamongan	124,606	178,890	266,767	403,474
11	Kabupaten Lumajang	107,282	117,290	170,243	242,112
12	Kabupaten Madiun	65,989	100,463	128,676	163,636
13	Kabupaten Magetan	74,500	112,759	122,840	165,617
14	Kabupaten Malang	192,761	255,198	333,189	502,755
15	Kabupaten Mojokerto	190,236	302,841	400,009	447,621
16	Kabupaten Nganjuk	118,057	201,045	237,474	323,046
17	Kabupaten Ngawi	74,198	100,690	138,774	195,607
18	Kabupaten Pacitan	57,171	67,334	89,470	150,467
19	Kabupaten Pamekasan	67,761	83,821	125,126	178,479
20	Kabupaten Pasuruan				

		198,793	296,721	372,454	480,758
21	Kabupaten Ponorogo	97,509	128,121	177,248	240,112
22	Kabupaten Probolinggo	86,530	127,942	163,832	221,719
23	Kabupaten Sampang	63,041	77,697	121,298	135,785
24	Kabupaten Sidoarjo	721,795	919,706	1,090,576	1,335,284
25	Kabupaten Situbondo	67,498	101,695	125,964	173,836
26	Kabupaten Sumenep	91,137	115,498	166,654	208,983
27	Kabupaten Trenggalek	80,965	109,185	124,094	182,174
28	Kabupaten Tuban	185,415	205,170	260,939	364,134
29	Kabupaten Tulungagung	121,703	182,445	213,010	342,571
30	Kota Blitar	56,370	75,235	82,436	131,921
31	Kota Kediri	126,965	137,461	128,676	238,318
32	Kota Madiun	55,684	85,740	111,379	173,236
33	Kota Malang	262,741	336,246	353,428	477,542
34	Kota Mojokerto	60,806	73,241	92,842	152,463
35	Kota Pasuruan	51,343	69,230	92,731	147,819
36	Kota Probolinggo	73,521	80,748	108,621	171,308
37	Kota Surabaya	2,570,794	2,953,981	3,520,137	4,091,867
38	Kota Batu	39,249	59,856	80,150	109,534

Lampiran 5

Data Dana Alokasi Umum (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	778,024	854,874	888,673	1,012,242
2	Kabupaten Banyuwangi	1,154,495	1,254,496	1,288,941	1,400,384
3	Kabupaten Blitar	944,298	1,027,252	1,037,911	1,128,511
4	Kabupaten Bojonegoro	876,022	920,522	895,987	949,118
5	Kabupaten Bondowoso	752,777	826,284	862,600	926,596
6	Kabupaten Gresik	804,904	863,398	873,266	923,469
7	Kabupaten Jember	1,417,604	1,539,723	1,586,837	1,709,892
8	Kabupaten Jombang	920,098	1,007,166	1,032,325	1,111,301
9	Kabupaten Kediri	1,056,481	1,144,879	1,177,392	1,242,230
10	Kabupaten Lamongan	958,345	1,042,125	1,064,301	1,166,655
11	Kabupaten Lumajang	828,525	898,218	923,492	990,248
12	Kabupaten Madiun	734,152	808,843	832,357	893,565
13	Kabupaten Magetan	761,637	840,087	856,279	916,052
14	Kabupaten Malang	1,439,234	1,572,192	1,613,162	1,694,884
15	Kabupaten Mojokerto	832,267	899,109	923,748	991,180
16	Kabupaten Nganjuk	928,266	1,004,038	1,024,223	1,078,695
17	Kabupaten Ngawi	896,053	980,530	995,119	1,058,208
18	Kabupaten Pacitan	647,293	700,743	714,847	807,907
19	Kabupaten Pamekasan	702,610	788,618	817,904	862,935
20	Kabupaten Pasuruan	992,689	1,068,869	1,089,359	1,200,611
21	Kabupaten Ponorogo	890,922	970,788	993,319	1,062,582
22	Kabupaten Probolinggo	848,994	929,381	956,970	977,570

23	Kabupaten Sampang	683,243	753,954	788,345	827,952
24	Kabupaten Sidoarjo	1,104,580	1,199,036	1,206,660	1,225,261
25	Kabupaten Situbondo	692,549	766,543	787,729	821,084
26	Kabupaten Sumenep	917,539	984,839	1,010,159	1,110,487
27	Kabupaten Trenggalek	737,815	815,508	839,498	901,379
28	Kabupaten Tuban	849,399	926,685	955,940	1,046,758
29	Kabupaten Tulungagung	996,301	1,083,859	1,111,457	1,172,557
30	Kota Blitar	355,673	392,222	400,654	428,743
31	Kota Kediri	562,943	634,352	832,357	617,780
32	Kota Madiun	474,093	511,090	509,817	511,375
33	Kota Malang	746,687	808,448	818,759	859,678
34	Kota Mojokerto	354,452	380,780	382,374	397,094
35	Kota Pasuruan	353,128	391,843	399,095	432,090
36	Kota Probolinggo	414,534	454,208	463,650	470,212
37	Kota Surabaya	1,160,026	1,200,889	1,147,385	1,233,380
38	Kota Batu	374,362	412,378	413,220	480,460

Lampiran 6

Data Belanja Modal (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	337.486	419.299	408.862	412.823
2	Kabupaten Banyuwangi	411.269	553.679	450.550	911.584
3	Kabupaten Blitar	245.273	342.177	364.406	692.718
4	Kabupaten Bojonegoro	419.204	540.069	623.532	967.918
5	Kabupaten Bondowoso	179.135	306.584	318.470	425.426
6	Kabupaten Gresik	361.604	561.011	592.779	413.340
7	Kabupaten Jember	517.154	557.789	544.174	460.451
8	Kabupaten Jombang	268.472	357.408	377.825	364.901
9	Kabupaten Kediri	378.597	535.500	454.074	612.052
10	Kabupaten Lamongan	214.333	266.644	321.308	616.499
11	Kabupaten Lumajang	239.432	272.450	339.373	347.885
12	Kabupaten Madiun	201.370	217.861	249.752	443.809
13	Kabupaten Magetan	144.953	217.861	213.024	286.944
14	Kabupaten Malang	384.480	222.684	543.840	683.933
15	Kabupaten Mojokerto	251.552	488.910	528.343	442.333
16	Kabupaten Nganjuk	249.227	380.133	454.092	447.729
17	Kabupaten Ngawi	174.378	230.906	244.552	355.374
18	Kabupaten Pacitan	107.354	116.966	132.162	379.167
19	Kabupaten Pamekasan	190.561	182.277	132.162	544.165
20	Kabupaten Pasuruan	275.582	349.954	428.702	838.441
21	Kabupaten Ponorogo	119.809	148.278	286.158	376.402
22	Kabupaten Probolinggo	206.888	281.323	367.963	289.647
23	Kabupaten Sampang	285.424	281.323	343.629	563.999
24	Kabupaten Sidoarjo	653.209	798.970	815.007	809.997
25	Kabupaten Situbondo	249.808	321.935	306.393	416.863
26	Kabupaten Sumenep	263.707	295.726	335.952	272.014
27	Kabupaten Trenggalek	219.924	294.777	294.235	362.840
28	Kabupaten Tuban	308.689	353.400	312.933	464.180
29	Kabupaten Tulungagung	127.010	209.146	352.908	574.342
30	Kota Blitar	106.499	108.775	157.597	203.372
31	Kota Kediri	190.730	236.132	249.752	381.846
32	Kota Madiun	160.922	181.800	193.773	246.394
33	Kota Malang	424.711	425.780	306.271	193.667

34	Kota Mojokerto	111.409	146.874	216.077	303.777
35	Kota Pasuruan	71.856	168.510	201.170	172.509
36	Kota Probolinggo	73.435	115.814	151.189	147.706
37	Kota Surabaya	1.732.019	2.000.778	2.131.478	1.789.394
38	Kota Batu	168.440	263.218	336.820	174.368



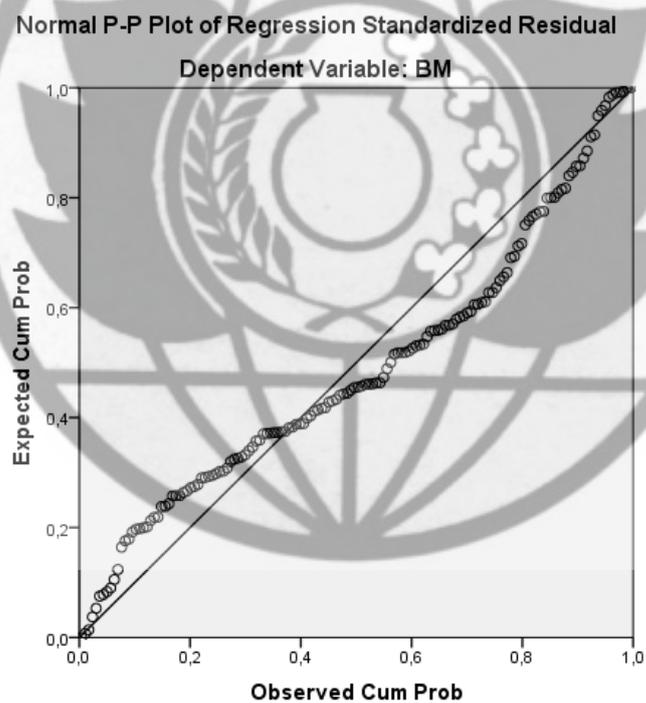
Lampiran 7

Hasil SPSS Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	152	71.856	2.131.478	383.228	307.366
PE	152	-0.15	0.86	0.3381	0.17273
PAD	152	39.249	4.091.867	296.543	532.643
DAU	152	353.128	1.709.892	893.151	287.312
Valid N (listwise)	152				

Hasil SPSS Uji Normalitas



Hasil SPSS Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PE	,968	1,033
PAD	,863	1,159
DAU	,890	1,124

a. Dependent Variable: BM

Hasil SPSS Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,685

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

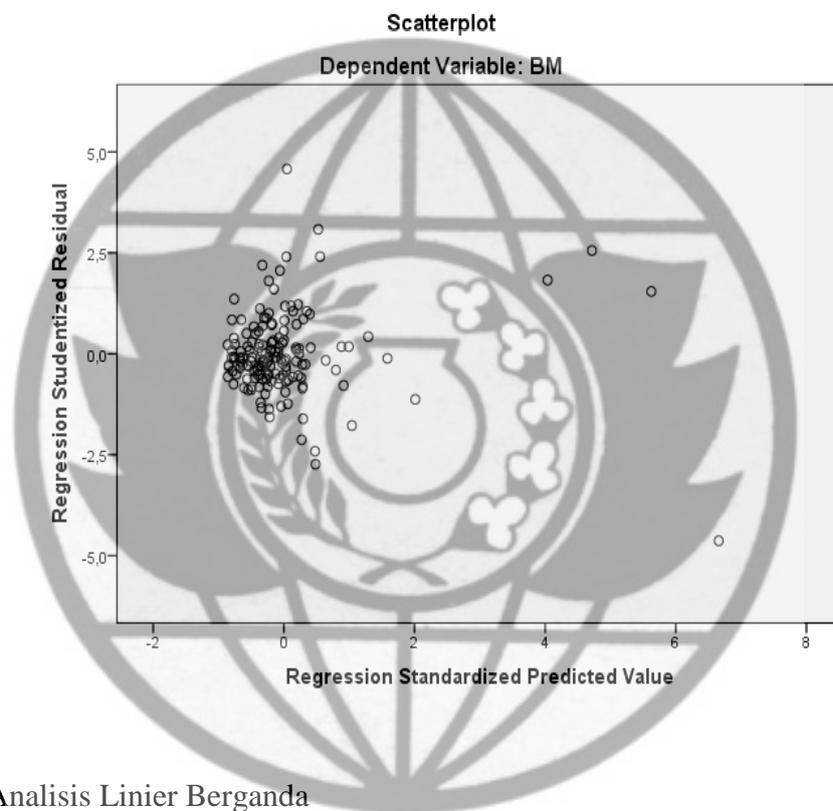
Variables Entered/Removed^a

Model	Variables		Method
	Entered	Removed	
1	DAU, PE, PAD ^b		. Enter

a. Dependent Variable: BM

b. All requested variables entered.

Hasil SPSS Uji Heteroskedasitas



Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	38365,389	32832,564			1,169	,244
PE	,043	,057	,079		,761	,448
PAD	,430	,061	,752		7,104	,000
DAU	,228	,037	,213		6,233	,000

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 ^a	,837	,834	125239,44342

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,201	3	4,733	2,904	,000 ^b
	Residual	2,143	148	1,704		
	Total	1,344	151			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

Hasil Uji Parameter Individual

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,031	3,678	,031		,975
PE	1,711	5,693	,064	1,993	,048
PAD	,481	,020	,840	24,537	,000
DAU	,225	,036	,210	6,229	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil Output SPSS